RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2019 – 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

dbmjatim

dbmjatim

binamargajatim

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk periode lima tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan target dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam periode lima tahun ke depan yaitu Tahun 2019–2024.

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai dan terwujudnya pelayanan jalan provinsi yang prima, dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas dan mobilitas) darat, mendorong kesimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Surabaya, Agustus 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. GATOT SULISTYO HADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600722 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**iii**
DAFTAR GAMBAR		**iiii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-1
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**II-8**
	2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Prangkat Daerah	II-8
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-28
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-36
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	**III-38**
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-38
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-39
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-40
	3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-48
	3.5 Penentuan isu – isu strategis	III-51
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	**IV-52**
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-52
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	**V-56**
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	**VI-59**
BAB VII	**KINERJA PENYLENGGARAAN BIDANG URUSAN**	**VII-71**
BAB VIII	**PENUTUP**	**VIII-75**

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-28
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	II-29
2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II-29
2.4	Aset Bangunan dan Kendaraan Dinas	II-30
2.5	Aset Peralatan Unit Pemeliharaan Rutin	II-31
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur	II-33
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur	II-35
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-54
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-57
5.2	Program Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendukung Nawa Bhakti	V-58
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur	VI-60
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-74

DAFTAR GAMBAR

2.1	Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur	II-10
2.2	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis	II-15
2.3	Struktur Organisasi Laboratorium Pengujian Konstruksi	II-28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi , kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan Rancangan Awal; (3) penyusunan Rancangan; (4) penyusunan Rancangan Akhir; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain, baik dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah, di mana dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah selain menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan, juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, serta sebagai evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 disusun dengan berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo 81);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

36. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/127/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor – 2 dan Jalan Kolektor – 3;
37. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 ini disusun dengan maksud :

1. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menyusun arah kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jalan.
3. Menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi.
4. Menyusun Indikator dan target kinerja.
5. Menyusun Program dan Kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 ini adalah :

1. Memberikan pedoman dan pengarah dalam penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
3. Memberikan panduan dalam pengukuran kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan penyelenggaraan jalan provinsi di Jawa Timur sepanjang 1.421,00 km, hal ini sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/128/KPTS/013/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, yang berada pada 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 114 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 75 tahun 2016, tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah “ Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di

bidang pekerjaan umum serta tugas pembantuan “, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, maka dibentuk susunan organisasi seperti terlihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

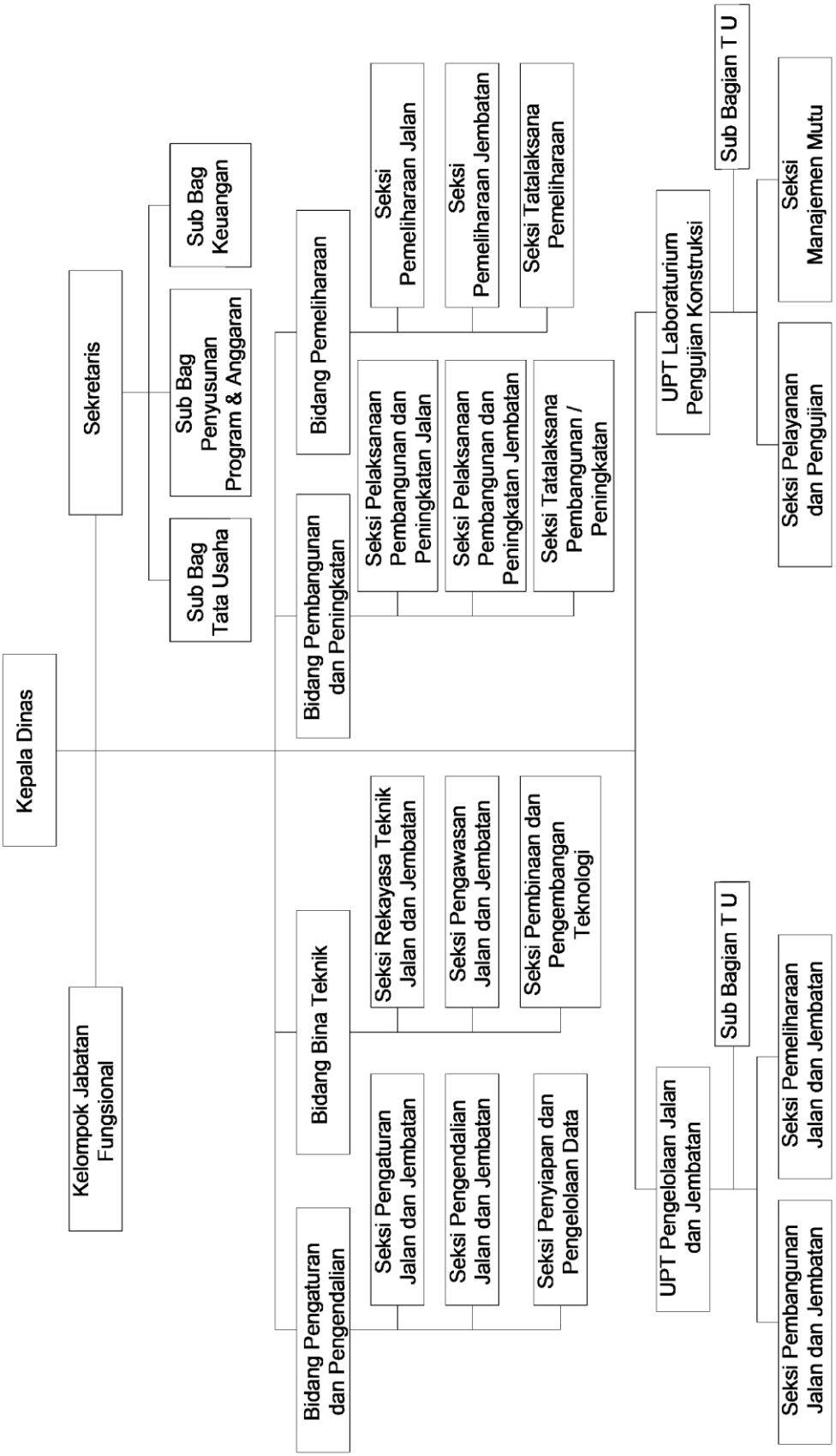

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 114 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

   Dalam melaksanakan tugas, kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

2. Sekretaris

   Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

   Fungsi :

   a) Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
   b) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
   c) Pengelolaan administrasi keuangan;
   d) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
   e) Pengelolaan asset dan barang milik Negara/daerah;
   f) Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
   g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang–undangan;
   h) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hokum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
   i) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
   j) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
   k) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
   l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengaturan dan Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman operasional, dan pengembangan jaringan.

Fungsi :

a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pengendalian;
b) Penyusunan perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan;
c) Pengelolaan pengembangan system manajemen jalan;
d) Penyusunan rancangan pengembangan jaringan jalan;
e) Penyusunan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan serta studi lainnya;
f) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan;
g) Pengelolaan data leger dan pemetaan jalan;
h) Penyusunan rancangan penetapan fungsi, status dan kelas jalan;
i) Pelaksanaan kajian laik fungsi jalan dan jembatan;
j) Pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan;
k) Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Bina Teknik

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik, pengawasan teknik, kajian teknik, manajemen mutu, penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan.

Fungsi :

a) Pelaksanaan perumusan kebijakan bina teknik;
b) Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
c) Pelaksanaan evaluasi hasil perencanaan teknik jalan dan jembatan;
d) Pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan;
e) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan teknik jalan dan jembatan;
f) Penyusunan panduan perkiraan harga satuan dasar dan harga satuan pekerjaan;

g) Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknik jalan dan jembatan;
h) Pelaksanaan kajian teknik dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
i) Pelaksanaan pembinaan teknis jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota;
j) Pelaksanaan kajian serta pengembangan teknik jalan dan jembatan;
k) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta pemberian fasilitas pengadaan lahan.

Fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
b) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan;
c) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan / kontrak kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
d) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan;
e) Pelaksanaan koordinasi pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan;
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan;
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Pemeliharaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan,

penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam.

Fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
b) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
c) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pengadaan / kontrak kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
e) Pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam;
f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
g) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT),

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Unit Pelaksana Teknis (UPT) kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :

A. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas - tugas teknis operasional di lapangan, dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan, pengelolaan jalan dan jembatan, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat.

Fungsi :

a) Pelaksanaan administrasi teknik penanganan jalan dan jembatan;
b) Pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan;
c) Pelaksanaan pemantauan penanganan jalan dan jembatan;
d) Pelaksanaan pengamatan kondisi jalan dan jembatan;
e) Pelaksanaan tugas ketatausahaan;
f) Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Terdapat 11 UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang terdiri dari :

1) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya,
2) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto,
3) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro,
4) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun,
5) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan,
6) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri,
7) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang,
8) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo,
9) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember,
10) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi,
11) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk struktur Organisasi seperti terlihat pada gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis

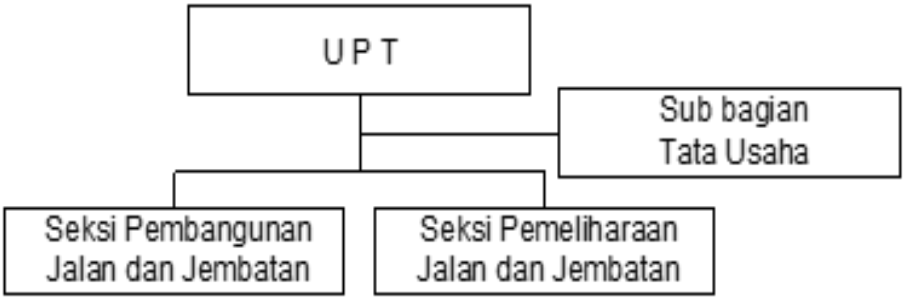

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, adalah :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya, berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan, yang meliputi :

NOMOR		N A M A R U A S	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		
Kabupaten Gresik			
150		Bts. Kota Surabaya - Driyorejo - Legundi	11,380
151		Legundi - Bts. Kab. Mojokerto	9,650
			21,030
Kota Surabaya			
150	11K	Jln. Mastrip (Surabaya)	7,860
150	12K	Jln. Gunungsari (Surabaya)	3,390
150	11K	Jln. Joyoboyo (Surabaya)	0,920
			12,170
Kabupaten Sidoarjo			
152		Krian By Pass(Simpang 4)-Krian(Simpang 5)	1,340
153		Krian - Bts. Kab. Mojokerto	7,550
154	11K	Jln. Pahlawan (Sidoarjo)	3,400
154		Bts Kota Sidoarjo – Krian	14,770
155		Sepanjang – Taman	1,450
156		Mlirip - Bts. Kab. Mojokerto	0,620
			29,130
Kabupaten Lamongan			
148		Babat – Bts. Kab. Jombang	30,780
149	11K	Jl. Lamong Rejo (Lamongan)	1,060
149	12K	Jl. Achmad Dahlan (Lamongan)	0,090
149	13K	Jl. Sunan Drajat (Lamongan)	0,690
149	14K	Jl. Raya Mantup (Lamongan)	2,170
149		Lamongan – Bts. Kab. Mojokerto	21,700

	56,490
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya	**118,820**

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto berkedudukan di Mojokerto dengan wilayah kerja Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang, yang meliputi :

NOMOR		N A M A R U A S	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		
Kabupaten Jombang			
166		Bts. Kab. Mojokerto – Ploso	13,800
167		Bts. Kab. Lamongan – Ploso	13,190
168		Ploso – Bts Kota Jombang	6,570
168	11K	Jl. Wahab Hasbullah (Jombang)	1,860
169	11K	Jl. Hasyim Asyari (Jombang)	2,280
169		Bts. Kota Jombang – Pulorejo	11,830
170		Pulorejo – Bts Kab. Kediri (Pare)	2,850
171		Pulorejo – Bts Kab. Kediri (Kandangan)	8,870
			61,250
Kabupaten Mojokerto			
157		Bts. Kab. Sidoarjo –Bts Kota Mojosari	2,680
157	11K	Jln.Pemuda (Mojosari)	2,150
157	12K	Jln. Erlangga (Mojosari)	0,780
157	13K	Jln. Hasanudin (Mojosari)	1.150
158		Bts. Kota Mojosari – Pandanarum	9,080
159		Pandanarum – Pacet	6,230
160		Bts. Kota Batu (Jbt. Cangar II)	10,370
161		Bts. Kab.Gresik - Mlirip	7,330
162		Bts. Kab. Sidoarjo – Mojokerto	3,290
163		Mojokerto – Gedek	4,710
164		Bts. Kab. Lamongan – Gedek	18,180
165		Gedek – BTS. Kab. Jombang	7,160

			73,110
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto			**134.360**

3. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro, berkedudukan di Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, yang meliputi :

NOMOR		N A M A R U A S	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		
Kabupaten Tuban			
145		Bts. Kab. Bojonegoro - Ponco	3,660
146		Ponco – Jatinegoro (Bts. Prov. Jateng)	42,460
147		Pakah – Ponco	35,960
			82,080
Kabupaten Bojonegoro			
143		Bts. Kota Bojonegoro – Bts. Kab. Tuban	3,110
143	11K	Jln. Jagung Suprapto (Bojonegoro)	0,540
143	12K	Jl. Sawunggaling (Bojonegoro)	0,990
143	13K	Jl. Basuki Rachmad (Bojonegoro)	1,540
144	11K	Jl. Cokroaminoto (Bojonegoro)	0,980
144	12K	Jl. KH. R. Moch. Rosyid (Bojonegoro)	1,680
144		Bts. KotaBojonegoro - (Pajeng) Bts. Kab. Nganjuk	39,570
			48,410
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro			**130,490**

4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun, berkedudukan di Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Trenggalek, yang meliputi :

NOMOR		N A M A R U A S	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		

Kabupaten Magetan			
141		Maospati - Bts. Kota Magetan	9,150
141	11K	Jln. Mongisidi (Magetan)	0,640
141	12K	Jln. Diponegoro (Magetan)	0,440
141	13K	Jln. Dr. Sutomo (Magetan)	0,270
141	14K	Jln. A. Yani (Magetan)	0,790
141	15K	Jln. PB. Sudirman (Magetan)	0,540
141	16K	Jln. Pahlawan (Magetan)	0,590
141	17K	Jln. Gubenur Suryo (Magetan)	2,460
142		Bts. Kota Magetan - Cemorosewu (Bts. Prov Jateng)	24,180
			39,060
Kabupaten Ponorogo			
139		Dengok - Bts. Kab. Pacitan	22,890
140		Bts. Kota Ponorogo–Biting (Bts. Prov. Jateng)	15,730
140	11K	Jln. Hayam Wuruk (Ponorogo)	2,410
140	12K	Jln. Trunojoyo (Ponorogo)	1,320
			42,350
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun			**81,410**

5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan, berkedudukan di Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan yang meliputi :

NOMOR RUAS	NOMOR SUB RUAS	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (KM)
Kabupaten Pacitan			
136		Bts. Kab. Ponorogo – Bts. Kota Pacitan	44,810
136	11K	Jln. Tentara Pelajar	2,510
136	12K	Jln. Basuki Racmad	0,600
137		Arjosari – Purwantoro (Bts. Prov. Jateng)	46,140
138		Wareng – Mukus	8,230
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan			**102,290**

6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri, berkedudukan di Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kab. Tulungagung, yang meliputi :

NOMOR		NAMA RUAS	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		
Kota Kediri			
175	11K	Jln. Sersan Bahrun (Kediri)	0,730
175	12 K	Jln. Gatot Subroto (Kediri)	1,290
175	13 K	Jln. Ahmad Dahlan (Kediri)	0,320
176	11 K	Jln. Kapt. Tendean (Kediri)	3,950
181	11K	Jln. A. Yani (Kediri)	0,640
			6,930
Kabupaten Nganjuk			
172		Bts.Kab. Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan)	20,660
173		Guyangan – Simpang Empat Candi	7,730
174		Bts. Kota Nganjuk (Simpang Empat Candi)- Bts. Kab. Kediri	10,280
			38,670
Kabupaten Kediri			
175		Bts. Kab. Nganjuk - Bts. Kota Kediri	10,280
176		Kediri - Bts. Kab. Blitar	14,520
177		Bts. Kab. Jombang – Pare	6,330
177	11K	Jln. Cokroaminoto (Pare)	2,080
177	12K	Jln. Ki Hajar Dewantoro (Pare)	1,760
177	13K	Jln. Veteran (Pare)	2,010
177	14K	Jln. Dr. Wahidin (Pare)	0,480
177	15K	Jln. Gajah Mada (Pare)	1,780
177	16K	Jln. Panglima Polim (Pare)	1,560
178		Bts. Kab. Jombang – Kandangan	3,580
179		Bts. Kab. Malang – Kandangan	2,090
180		Kandangan –Bts. Kota Pere	6,040

180	11K	Jln. Mayor Bismo (Pare)	3,000
180	12K	Jln. Letjen Sutoyo (Pare)	1,530
180	13K	Jln. Wr. Supratman (Pare)	0,410
180	14K	Jln. P. Sudirman (Pare)	1,460
180	15K	Jln. Pahlawan (Pare)	1,130
180	16K	Jln. Dr. Soetomo (Pare)	1,530
180	17K	Jln. Sukarno - Hatta (Pare)	1,360
181		Bts. Kota Pare – Bts. Kota Kediri	15,530
			78,460
Kabupaten Tulungagung			
182		Ngantru – Bts. Kab. Blitar	9,580
			9,580
Kota Blitar			
186	11K	Jln.Tanjung (Blitar)	2,540
186	12K	Jln. Cepaka (Blitar)	0,380
186	13K	Jln. Cemara (Blitar)	2,330
			5,250
Kabupaten Blitar			
183		Bts. Kab. Kediri – Srengat	8,140
184		Bts. Kab. Tulungagung – Srengat	10,250
185		Srengat - Bts. Kota Blitar	10,490
			28,880
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri			**167,770**

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang, berkedudukan di Malang dengan wilayah kerja Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, yang meliputi :

NOMOR		NAMA RUAS	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		
Kota Malang			
188	11K	Jln. Tlogo Mas (Malang)	2,320
188	12K	Jln. Mayjen. Hariyono (Malang)	1,850
188	13K	Jln. Sukarno - Hatta (Malang)	2,690

188	14K	Jln. Borobudur (Malang)	1,090
188	15K	Jln. A. Yani (Malang)	1,580
189	11K	Jln. Kol. Sugiono (Malang)	1,070
			10,600
Kabupaten Malang			
187		Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri	39,950
188		Bts. Kota Malang - Bts. Kota Batu (Sengkaling)	1,790
189		Bts. Kota Malang – Turen	19,970
190		Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso)	8,000
			69,710
Kota Batu			
191	11K	Jln. Raya Cangar	7,720
191	12K	Jln. Raya Tulungrejo	7,190
191	13K	Jln. Raya Punten	1,500
191	14K	Jln. Bukit Berbunga	2,400
191	15K	Jln. Brantas	0,840
192	11K	Jln. Trunojoyo	4,540
192	12K	Jln. P. Sudirman	1,580
192	13K	Jln. Gajah Mada	0,250
192	14K	Jln. Diponegoro	1,350
192	15K	Jln. Patimurah	1,360
192	16K	Jln. Ir. Soekarno	5,160
192	11K	Jln. Dr. M. Hatta	2,210
			36,100
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang			**116,41**

8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo, berkedudukan di Probolinggo dengan wilayah kerja Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, yang meliputi :

NOMOR		**N A M A R U A S**	**PANJANG JALAN (KM)**
RUAS	**SUB RUAS**		

Kabupaten Pasuruan			
194		Pandaan – Tretes	9,270
195		Bts. Kota Pasuruan – Kejayan	1,690
196		Kejayan – Tosari	35,270
197		Kejayan – Purwosari	19,000
198		Purwodadi – Nongkojajar	20,910
			86,140
Kota Pasuruan			
195	11K	Jl. KH. Achmad Dahlan/Pohjentrek	1,290
			1,290
Kabupaten Lumajang			
199		Grobogan – Bts. Kab. Jember	20,900
200	11K	Jln. Letjen. Panjaitan	0,580
200	12K	Jln. Kapten Suwandak	0,790
200	13K	Jln. Mayjen Sukertiyo	0,760
200	14K	Jln. Mahakam	1,190
200		Bts. Kota Lumajang - Bts. Kab. Jember	14,280
			38,500
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo			**125,930**

9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember, yang berkedudukan di Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, yang meliputi :

NOMOR		N A M A R U A S	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		
Kabupaten Jember			
201		Bts. Kab. Lumajang – Pondokdalem	9,750
202		Bts. Kab. Lumajang – Kencong	6,780
203		Kencong – Kasian	15,330
204		Kasian – Puger	7,030
205		Kasian – Balung	7,310

206		Balung – Rambipuji	10,560
207		Balung – Ambulu	13,590
208		Ambulu - Bts. Kota Jember (Mangli)	17,970
208	11K	Jln. Oto Iskandar (Jember)	1,790
209		Arjasa - Bts. Kota Jember	1,400
209	11K	Jln. Supriadi (Jember)	0,810
209	12K	Jln. Slamet Riyadi (Jember)	2,590
209	13K	Jln. Moch. Seruji (Jember)	0,930
209	14K	Jln. PB. Sudirman (Jember)	1,520
210		Bts. Kab. Bondowoso – Arjasa	9,200
211		Bts. Kab Bondowoso – Kalisat	12,830
212		Kalisat – Sempolan	8,190
			127,580
Kabupaten Bondowoso			
213		Bts. Kota Bondowoso - Bts. Kab. Situbondo	22,960
213	11K	Jln. K.H. Hasyim Ashari (Bondowoso)	1,050
213	12K	Jln. K.H. Wachid Hasyim (Bondowoso)	0,620
213	13K	Jln. PB. Sudirman (Bondowoso)	0,450
213	14K	Jln. Letjen. Karsono (Bondowoso)	0,250
214		Maesan - Bts. Kab. Jember (Arjasa)	2,190
215	11K	Jln. Letjen. Sutarman (Bondowoso)	0,220
215	12K	Jln. A. Yani (Bondowoso)	1,960
215	11K	Jln. Mastrip (Bondowoso)	0,430
215		Bts. Kota Bondowoso – Maesan	11,730
216		Bts. Kab. Situbondo - Bts. Kota Bondowoso	20,320
216	11K	Jln. Diponegoro (Bondowoso)	2,470
217		Maesan –Bts. Kab. Jember (Kalisat)	4,230
			68,880
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember			**196,460**

10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi yang berkedudukan di Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, yang meliputi :

NOMOR		N A M A R U A S	PANJANG JALAN (KM)
RUAS	SUB RUAS		
Kabupaten Banyuwangi			
220		Genteng Kulon – Wonorekso	16,140
221		Wonorekso – Rogojampi	4,620
222		Genteng – Temuguruh	10,530
223		Temuguruh-Wonorekso	5,170
224		Jajag –Simpang Lima Petahunan - Pasanggaran	22,100
225		Benculuk – Glagah Agung	9,660
226		Glagah Agung – Grajagan	9,710
227		Glagah Agung - Tegal Dlimo	13,140
			91,070
Kabupaten Situbondo			
218	11K	Jln. A. Jakfar (Situbondo)	0,160
218	12K	Jln. Diponegoro (Situbondo)	0,480
218	13K	Jln. Pemuda (Situbondo)	5,940
218		Bts. Kab. Bondowoso - Bts. Kota Situbondo	2,710
219		Buduan - Bts. Kab. Bondowoso	7,800
			17,090
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Banyuwangi			**108,160**

11. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan, berkedudukan di Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, yang meliputi :

NOMOR RUAS	SUB RUAS	NAMA RUAS	PANJANG JALAN (KM)
Kabupaten Sampang			
228	11K	Jln. Kusuma Bangsa (Sampang)	1,110
228		Bts. Kota Sampang - Ketapang	37,200
229	11K	Jln. Imam Bonjol (Sampang)	0,810
229		Bts. Kota Sampang - Omben	11,800
230		Bts. Kota Sampang - Omben	5,380
			56,300
Kabupaten Pamekasan			
231	11K	Jln. Stadion (Pamekasan)	1,225
231	12K	Jln. Raya Nyalaran (Pamekasan)	1,550
231	13K	Jln. Raya Blumbungan (Pamekasan)	2,450
231		Pamekasan – Sotabar	34,960
232		Bts. Kab. Sampang - Pamekasan	11,100
232	11K	Jln. Raya Propoh (Pamekasan)	0,980
232	12K	Jln. Dirgahayu (Pamekasan)	1,070
232	13K	Jln. Pintu Gerbang (Pamekasan)	0,320
232	14K	Jln. Kabupaten (Pamekasan)	0,520
232	15K	Jln. Diponegoro (Pamekasan)	0,490
			54,600
Kabupaten Sumenep			
233	11K	Jln. Imam Bonjol (Sumenep)	0,550
233	12K	Jln. Raya Gapura (Sumenep)	1,170
233		Bts. Kota Sumenep - Pantai Lumbang	26,280
			28,000
Panjang Jalan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan			**138,900**

B. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

UPT Laboratorium Pengujian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas :

UPT Laboratorium Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan laboratorium pengujian, manajemen mutu, fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi bidang jalan dan jembatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Fungsi :

a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b) Penyiapan program pengujian laboratorium;
c) Pelaksanaan pengujian laboratorium;
d) Pengendalian kualitas bahan dan hasil pekerjaan;
e) Pemberian fasilitasi pengujian laboratorium dalam menunjang kegiatan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
f) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium;
g) Pelaksanaan koordinasi pelayanan Laboratorium Pengujian;
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibentuk struktur organisasi seperti terlihat pada gambar 2.3 berikut :

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Laboratorium Pengujian Konstruksi

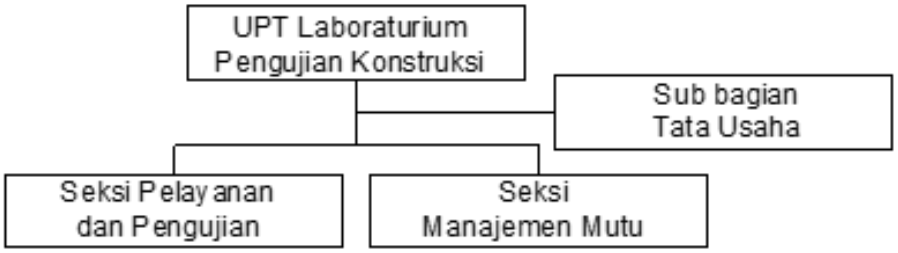

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur meliputi sumber daya manusia, sumber aset/ modal. Sumber daya aset/modal meliputi bangunan gedung dan tanah, peralatan mesin pemeliharaan jalan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur status Maret 2019 berjumlah 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan golongan ruang kepangkatan, pendidikan, dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1., Tabel 2.2., dan Tabel 2.3. dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN			JUMLAH
	JENJANG	TEKNIK	NON TEKNIK	
1.	S2	72	38	110
2.	S1	169	103	272
3.	D3	8	5	13
4.	SLTA	-	483	483
5.	SLTP	-	53	53

6.	SD	-	50	50
J U M L A H				**981**

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1.	> 54 TAHUN	461
2.	50 – 54 TAHUN	235
3.	40 – 49 TAHUN	173
4.	30 – 39 TAHUN	71
5.	< 30 TAHUN	41
J U M L A H		**981**

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	I/A	-
2.	I/B	-
3.	I/C	4
4.	I/D	4
5.	II/A	49
6.	II/B	27

7.	II/C	136
8.	II/D	109
9.	III/A	142
10.	III/B	231
11.	III/C	82
12.	III/D	128
13.	IV/A	58
14.	IV/B	8
15.	IV/C	-
16.	IV/D	1
17.	IV/E	-

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Dalam penyelenggaraan jalan Provinsi Jawa Timur didukung sarana prasarana berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor, dengan rincian jenis aset sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4. Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Tabel 2.4 Aset Bangunan dan Kendaraan Dinas

NO	DAFTAR SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI			
		BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	Kantor Dinas PU Bina Marga	1			
2.	Kantor UPT	13			
3.	Kantor Pembantu UPT		38		
4.	Rumah dinas				

5.	Sarana Transportasi				
	a. Kendaraan roda dua (R2)				
	b. Kendaraan roda empat (R4)				

Tabel 2.5 Aset Peralatan Unit Pemeliharaan Rutin

NO	DAFTAR PERALATAN	JUMLAH PERALATAN DALAM KONDISI			
		BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Air Compressor	2	4	4	1
2	Asphalt Finisher	6	3		
3	Asphalt Sprayer	2	4	2	2
4	Asphalt Cutter	1	1	2	
5	Asphalt Cold Milling Machine	6	3		
6	Baby Roller	1	9	5	1
7	Breaker	1			
8	Bulldozer	5	2		
9	BURNER (Kompor Pemanas Aspal)		1	2	2
10	Chainsaw	3	4	6	2
11	Compressor	2	1		
12	Concrete Cutter	1	2	1	
13	Concrete Mixer			4	2
14	CORE DRILL	2			
15	Crane		1		
16	Generator set	1	2	1	
17	Dump Truck	14	10		
18	Excavator	2	1		
19	Excavator Mini	6	2		
20	Excavator On Track	2			
21	Flatbed Truck Crane	6	2		
22	Flatbed truck	1	1		
23	Forklif	1			
24	Grass Cutter	3		1	3
25	Jack Hammer	1	1	1	1
26	Three Wheel Roller		2	4	1
27	Mobil Barang		1		
28	Mobil Barang/Ligting crene	1			
29	Mobile Crane	2			
30	Motor Grader	2	3		
31	Pan Mixer 300 lt				1

32	Plate Tamper Compactor	2	7	5	2
33	PNEUMATIC TIRE ROLLER (TR)	4	5		
34	Self Loader Truck	5	1		
35	Self loader Truck (Trailer)	1			
36	Soil Compactor	1	1	1	
37	Stasion Wagon		1		
38	Towing	1			
39	Tandem Roller	8	12		1
40	Trailer TW.			1	
41	Truck				1
42	Truck Barang		3		
43	Truck Crane		4		
44	Truck Trailer Low Bed	1			
45	Vibrating Plate Tamper		2	3	2
46	Vibrator Roller		2	2	
47	Wheel Loader	4	7	1	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan jalan sepanjang 1.760,91 kilometer Mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 dan Sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/128/KPTS/013/2016 tanggal 12 Februari 2016, panjang jalan yang provinsi menjadi 1.421,00 kilometer. Terdapat penurunan panjang jalan provinsi yang disebabkan karena terdapat beberapa ruas jalan berstatus provinsi yang beralih status menjadi jalan berstatus nasional maupun jalan kabupaten. Selain itu, terdapat juga perubahan status dari jalan nasional dan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap merupakan gambaran kondisi baik dan sedang jalan provinsi dibagi dengan panjang total jalan provinsi. Sedangkan persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2015 – 2019. Ada 3 (tiga) indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa timur

`	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya (2019)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap.			91,77	92,00	89,43	96,42	92,43	89,43	88,87	90,31	91,08	97,21	99,37	93,66	98,54
2	Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.			61,82	56,87	59,01	59,79	60,56	56,89	57,9	59,16	60,02	100,04	98,12	98,95	99,11
3	Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan			0	44,50	0,00	48,14	57,45	44,5	0	48,14	56,21	100,00	-	100,00	97,84
4	Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan			0	43,69	0,00	54,15	57,45	43,69	0	54,15	56,21	100,00	-	100,00	97,84

Capaian kinerja juga dilakukan terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya periode 2015 – 2019 untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan penyelenggaraan jalan seperti pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	636.446.986.000	550.420.973.385	959.137.461.000	487.524.283.000	520.137.178.213	535.963.792.804	834.437.096.723	472.589.250.040	81,73	97,37	87,00	96,94	658.382.425.846	590.781.829.444,90
Program Peningkatan / Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	42.683.014.000	56.313.847.000	37.302.252.000	-	36.832.182.700	54.132.124.408	35.667.889.344	-	86,29	96,13	95,62	-	34.074.778.250	31.658.049.112,98
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan	500.000.000.000	-	-	-	134.896.842.945	-	-	-	26,98	-	-	-	125.000.000.000	33.724.210.736,25
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	1.103.960.000	-	-	-	1.103.960.000	-	-	-	100,00	#DIV/0!	-	275.990.000	275.990.000,00
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengaturan, Pengendalian Jalan Dan Jembatan	-	-	-	8.759.760.000	-	-	-	7.790.332.320	-	-	-	88,93	2.189.940.000	1.947.583.080,00
Program Pemenuhan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan	-	-	-	23.717.685.000	-	-	-	19.839.470.105	-	-	-	83,65	5.929.421.250	4.959.867.526,25
Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dan Rekonstruksi Jalan Dan Jembatan Serta Fasilitasi Pengadaan Lahan	-	-	-	45.531.358.000	-	-	-	18.024.857.971	-	-	-	39,59	11.382.839.500	4.506.214.492,75
Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan/Jembatan	-	-	-	28.086.153.000	-	-	-	24.252.018.917	-	-	-	86,35	7.021.538.250	6.063.004.729,25
Program Pengelolaan Peralatan Berat Dan Jembatan Bailey	-	-	-	9.906.200.000	-	-	-	8.861.064.711	-	-	-	89,45	2.476.550.000	2.215.266.177,75
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan & Jembatan	-	-	-	4.693.100.000	-	-	-	4.186.591.235	-	-	-	89,21	1.173.275.000	1.046.647.808,75
Program Pembangunan Dan Rekonstruksi Jalan Dan Jembatan	-	-	-	349.750.278.000	-	-	-	280.428.378.000	-	-	-	80,18	87.437.569.500	70.107.094.500,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dituntut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jalan berupa kecepatan respon terhadap perbaikan kerusakan jalan, peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang dengan indikator kinerja berupa kemantapan jalan, peningkatan kapasitas jalan pada ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan pengembangan jaringan jalan untuk mendukung kawasan strategis dan kawasan potensial di Wilayah Jawa Timur.

Pemanfaatan teknologi informasi maupun teknologi peralatan untuk penanganan jalan dan jembatan merupakan alternatif yang dapat menunjang terhadap perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan di bidang jalan dapat dijelaskan dengan analisa SWOT sebagai berikut :

1. Strength (Kekuatan)

   Beberapa unsur kekuatan untuk mengembangkan pelayanan di bidang jalan yang antara lain :

   a. Kondisi untuk seluruh jalan provinsi memiliki tingkat kemantapan fungsionalnya sebesar 91,08% pada akhir tahun 2018;
   b. Tenaga teknis profesional dan Pejabat Fungsional jalan dan jembatan yang ada mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan di bidang jalan.
   c. Peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) yang ada, baik alat berat maupun jembatan bailey sangat mendukung dalam penanganan yang cepat terhadap jalan yang rusak maupun kejadian bencana.

2. Weakness (Kelemahan)

   Beberapa yang dapat menyebabkan lemahnya pelayanan dalam bidang jalan antara lain :

   a. Masih rendahnya kesadaran pengendara kendaraan bermotor terhadap paraturan lalu lintas mengenai batasan beban angkut kendaraan;

b. Kondisi cuaca pada musim hujan dengan intensitas tinggi;
c. Rusaknya jalan dan jembatan akibat bencana alam;
d. Berkurangnya jumlah tenaga teknis profesional dikarenakan purna tugas dan rekrutmen tenaga teknis yang belum sesuai dengan kebutuhan.

3. Opportunities (Peluang)

Dalam pengembangan pelayanan bidang jalan terdapat beberapa peluang yang dapat dilakukan yaitu :

a. Meningkatkan jumlah tenaga profesional teknis dengan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan jabatan;
b. Menambah kelengkapan peralatan UPR pada setiap Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan;
c. Penggunaan teknologi baru untuk pemeliharan jalan dan jembatan;
d. Penyediaan data kondisi jalan dan jembatan yang selalu ter-update;
e. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan.

4. Threats (Ancaman)

Beberapa ancaman yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan :

a. Adanya tuntutan pidana dari pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang rusak;
b. Tuntutan penanganan yang cepat terhadap jalan dan jembatan yang rusak;
c. Tuntutan dari masyarakat Tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang jalan yang aman, nyaman dan lancar;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja dari tahun – tahun sebelumnya, permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat diinventarisir sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan jalan jauh lebih tinggi dari kondisi insfrastruktur jalan provinsi yang ada serta terbatasnya ketersediaan anggaran untuk penanganan jalan provinsi yang ideal sesuai kondisi insfrastruktur jalan yang ada.
b. Sebagian besar umur rencana jalan telah terlampaui, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan yang relatif cepat.
c. Sebagian besar lebar jalan pada jalan provinsi belum memenuhi standar jalan provinsi. Kondisi lebar jalan akhir tahun 2018, jalan provinsi yang telah memenuhi standar sebesar 48,66 % atau 691,43 km dari 1.421 km panjang Jalan Provinsi.
d. Beberapa ruas jalan, utamanya pada perkotaan dan kawasan strategis memiliki nilai VCR > 1, hal ini mengakibatkan terganggunya lalu lintas dan mempengaruhi waktu tempuh kendaraan.
e. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur (Pansela) yang sampai dengan Tahun 2018 belum tuntas dikarenakan masih ada lahan yang belum bebas.
f. Pengembangan kawasan strategis dan potensial di Wilayah Jawa Timur yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi maupun kawasan yang masuk dalam strategis provinsi.
g. Potensi Sumber Daya Manusia terus menurun yang disebabkan oleh banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan teknis yang sudah purna tugas dan mendekati purna tugas, serta belum ada penggantinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong **"**, dalam periode 2019 – 2024, dengan 7 Misi sebagai berikut :

1. Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor Maupun Antar Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial Dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat Yang Rentan.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur Yang Meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan Serta Membangun Kedaulatan Pangan.
4. Kemudahan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan dan Keterhubungan Wilayah.
5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris.
6. Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.
7. Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya

Dari ke **tujuh misi** tersebut di atas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengemban **misi ke-satu** yaitu Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor Maupun Antar Wilayah, dengan Tujuan Renstra yaitu Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai upaya mensinergikan program pembangunan dengan Pemerintah Pusat maka perlu adanya telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, sebagai sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2019 telah dijabarkan dengan Visi " Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis, maka disusun Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua";
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya terdapat hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;
c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah Pulau/Kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan "Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)" yang di dalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau, sebagai berikut:

1. **Pulau Sumatera**. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan).
2. **Pulau Jawa**. Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: Sebagai Lumbung Pangan Nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang

destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan).

3. **Pulau Papua**. Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat.
4. **Pulau Kalimantan**. Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa.
5. **Pulau Bali dan Nusa Tenggara.** Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri mangan, dan tembaga.
6. **Kepulauan Maluku.** Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari.

7. **Pulau Sulawesi.** Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah : Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari.

Beberapa kawasan strategis yang mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah KSPN Bromo – Tengger – Semeru (BTS) dan KSPN Ijen Baluran, KSPN Trowulan dan sekitarnya, Karst Pacitan dan Kawasan Strategis Potensial Selingkar Wilis dan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur (Pansela). Beberapa ruas jalan provinsi yang mendukung kawasan strategis adalah sebagai berikut :

1. Ruas jalan provinsi yang mendukung akses KSPN Bromo - Tengger - Semeru dan sekitarnya :
   a. Bts. Kota Pasuruan – Kejayan (Link. 195)
   b. Kejayan – Tosari (Link. 196)
   c. Kejayan – Purwosari (Link. 197)
   d. Purwodadi – Nongkojajar (Link. 198)
2. Ruas jalan provinsi yang mendukung akses KSPN Trowulan dan sekitarnya :
   a. Bts. Kab. Sidoarjo - Bts. Kota Mojosari (Link. 157)
   b. Bts. Kab. Gresik – Mlirip (Link. 161)
   c. Bts. Kab. Sidoarjo – Mojokerto (Link. 162)
   d. Mojokerto – Gedek (Link. 163)
   e. Jln. Wahab Hasbullah (Link. 168.11K)
   f. Jln. Hasyim Ashari (Link. 168.12K)
   g. Bts. Kota Jombang – Pulorejo (Link. 169)
3. Ruas jalan provinsi yang mendukung akses KSPN Ijen - Baluran dan Sekitarnya :
   a. Bts. Kota Bondowoso - Bts. Kab. Situbondo (Link. 213)

   b. Bts. Kota Bondowoso – Maesan (Link. 215)
   c. Bts. Kab. Bondowoso - Bts. Kota Situbondo (Link. 218)
4. Ruas jalan provinsi yang mendukung akses KSPN Karst Pacitan dan Sekitarnya :
   a. Arjosari - Purwantoro (Bts. Prov. Jateng) (Link. 137)
   b. Wareng – Kemukus (Link. 138)
5. Ruas jalan provinsi yang mendukung akses Jalan Lintas Selatan :
   a. Bts. Kota Malang – Turen (Link. 189)

Sedangkan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang juga membutuhkan dukungan adalah sebagai berikut :

1. KSPP Tuban – Lamongan – Gresik dan sekitarnya
2. KSPP Surabaya Kota dan sekitarnya
3. KSPP Trowulan – Jombang dan sekitarnya
4. KSPP Kepulauan Bawean dan sekitarnya
5. KSPP Batu dan sekitarnya
6. KSPP Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya
7. KSPP Pantai Malang Selatan dan sekitarnya
8. KSPP Tahura R. Soerjo dan sekitarnya
9. KSPP Singosari dan sekitarnya
10. KSPP Ijen – Baluran dan sekitarnya
11. KSPP Banyuwangi dan sekitarnya
12. KSPP G Land – Alas Purwo dan sekitarnya
13. KSPP Meru Betiri dan sekitarnya
14. KSPP Sarangan – Lawu dan sekitarnya
15. KSPP Karst Pacitan dan sekitarnya
16. KSPP Kelud dan sekitarnya
17. KSPP Selingkar Wilis dan sekitarnya
18. KSPP Sumenep dan sekitarnya
19. KSPP Bangkalan – Sampang – Pamekasan dan sekitarnya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam program pembangunan prasarana dan pengembangan infrastruktur jalan di Jawa Timur perlu adanya sinkronisasi yang mengintegrasikan antar pusat kegiatan dan sebagai pembuka akses wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan Jawa Timur dan Kepulauan Madura serta pembuka akses ke wilayah potensial di Jawa Timur. Pengembangan jaringan jalan yang diantaranya pembangunan jalan bebas hambatan/Tol dan peningkatan status jalan.

Rencana Pengembangan Jalan Bebas Hambatan/Tol Antar Kota, terdiri dari :

1) Probolinggo - Banyuwangi (+ 172,91 km)
2) Bunder - Manyar (+ 9,19 km)
3) Manyar - Tuban (+ 65,00 km)
4) Demak - Tuban (+ 174,00 km)
5) Mojokerto - Gempol (+ 38,71 km)
6) Kertosono - Kediri (+ 40,50 km)
7) Malang - Kepanjen (+ 24,00 km)
8) Singosari - Batu (+ 00,00 km)

Usulan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan/Tol :

1) Sukorejo - Batu (+ 40,00 km)
2) Batu - Kediri (+ 70,00 km)
3) Kediri - Tulungagung (+ 00,00 km)
4) Probolinggo - Lumajang (+ 32,00 km)
5) Lumajang - Jember (+ 00,00 km)
6) Bandara Juanda - Gempol (+ 46,00 km)
7) Suramadu - Tanjung Bulupandan (+ 15,30 km)

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri atas: Jalan provinsi kolektor primer-2 (JKP-2) meliputi :

1) Nganjuk - Bojonegoro - Ponco - Jatirogo - Bts. JawaTengah

2) Tuban – Bojonegoro - Nganjuk
3) Ponco - Pakah
4) Kandangan - Pulorejo - Jombang - Ploso - Babat
5) Gedek - Lamongan
6) Mojokerto - Mlirip - Legundi - Driyorejo - Joyoboyo
7) Turen - Malang - Batu - Kandangan - Pare - Kediri
8) Batu - Pacet - Mojosari - Krian By Pass
9) Sidoarjo - Krian
10) Karanglo - Pendem
11) Pare - Pulorejo
12) Pandaan – Tretes
13) Purwodadi – Nongkojajar
14) Purwosari - Kejayan - Pasuruan
15) Kejayan - Tosari
16) Lumajang - Kencong - Kasihan - Balung - Ambulu - Mangli
17) Kasihan - Puger
18) Jember - Bondowoso - Situbondo
19) Gentengkulon - Wonorekso - Rogojampi
20) Blitar - Srengat - Kediri - Nganjuk
21) Arjosari - Nawangan
22) Pacitan - Arjosari – Dengok
23) Wareng - Mukus
24) Maospati - Magetan - Cemorosewu
25) Ponorogo - Biting
26) Ngantru - Srengat

Jalan kolektor primer-3 (JKP-3) meliputi:

1) Sepanjang - Taman
2) Mojokerto - Gedek - Bts. Kab. Jombang/Bts. Kab. Mojokerto - Ploso
3) Grobogan - Bts.Kab.Jember/Bts.Kab.Lumajang - Pondokdalem
4) Balong - Rambipuji
5) Maesan - Kalisat - Sempolan

6) Buduan - Bondowoso
7) Genteng - Temuguruh - Wonorekso
8) Jajag - Simpang Lima Petahunan - Pasanggaran
9) Benculuk - Glagah Agung - Grajagan
10) Glagah Agung - Tegal Dlimo
11) Sampang - Ketapang
12) Sampang - Omben – Pamekasan
13) Pamekasan - Sotabar
14) Sumenep - Pantai Lumbang

Jaringan Jalan Strategis Provinsi di Provinsi Jawa Timur :

1) Dengok - Pacitan
2) Ponorogo - Biting (Bts. Prov. Jateng)
3) Maospati - Magetan
4) Bojonegoro - Nganjuk - Guyangan - Simpang Empat Candi - Kediri - Srengat - Blitar
5) Pakah - Ponco
6) Babat - Jombang - Pulorejo - Pare - Kediri
7) Joyoboyo - Driyorejo - Legundi - Mlirip - Mojokerto - Gedek - Ploso
8) Krian By Pass - Krian - Mojosari
9) Sidoarjo - Krian
10) Karanglo - Batu
11) Turen - Malang - Batu - Bts. Kab. Kediri
12) Pandaan - Tretes
13) Pasuruan - Kejayan - Tosari
14) Kejayan - Purwosari
15) Purwodadi - Nongkojajar
16) Lumajang - Kencong - Kasian - Balung - Rambipuji
17) Jember - Arjasa - Maesan - Bondowoso - Situbondo
18) Genteng Kulon - Wonorekso - Rogojampi
19) Jajag - Simpang Lima Pertahunan - Pasanggaran

3.5 Penentuan isu – isu strategis

Beberapa kendala dalam pelayanan di bidang jalan kepada masyarakat antara lain :

1) Tuntutan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih tinggi dari kondisi kemantapan jalan provinsi serta anggaran untuk penanganan jalan;
2) Ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan kendaraan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan;
3) Jalan yang lebarnya belum memenuhi standar (minimal 7 meter);
4) Kondisi kerusakan jalan karena umur rencana telah terlampaui;
5) Pada puncak musim hujan terjadi kerusakan permukaan secera serentak;
6) Jumlah jaringan jalan yang belum mamadai untuk peningkatan perekonomian daerah tertinggal;
7) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang belum didukung infrastruktur jalan yang memadai.

Permasalahan tersebut di atas menjadi bagian isu strategis yang menjadi prioritas dalam penanganan jalan dan jembatan kedepan, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

1) Mempertahankan kondisi kemantapan jalan dengan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala jalan, rekonstruksi jalan;
2) Penyelesaian penanganan jalan yg memiliki VCR > 1 dengan peningkatan kapasitas jalan;
3) Pelebaran jalan menjadi standar 7 meter;
4) Penyelesaian penanganan kerusakan yang umur rencananya sudah terlampaui dengan rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan dan rekonstruksi/peningkatan struktur jalan;
5) Pemeliharaan rutin jalan dengan menggunakan alat mekanis yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan;
6) Pengembangan jaringan jalan dan pembangunan jalan baru untuk Kawasan Daerah Tertinggal dan Kawasan Strategis Potensial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan **Sasaran** merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu tujuan dan sasaran dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Untuk mengukur kinerja jalan antar wilayah di Jawa Timur, maka disusun parameter sebagai berikut :

1. Indeks Konektivitas,
2. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah,
3. Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan,
4. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap,
5. Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan.

Indikator Tujuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur di Bidang Jalan berupa **Indeks konektivitas** yang didukung oleh variabel Tingkat Pelayanan Jalan (*Level Of Services*). Jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan kondisi kemantapan jalan, yang masing – masing variabel mempunyai tingkat dukungan yang berbeda tetapi memberikan pengaruh yang kuat sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai indeks konektivitas.

Analisis indeks konektivitas ini diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan hubungan suatu wilayah dengan wilayah – wilayah lainnya, dimana semakin meningkatnya hubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks konektivitas, diharapkan dapat memperlancar arus pergerakan manusia, barang, dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Selain Indeks Konektivitas juga ditetapkan **Indikator Sasaran**, berupa Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan parameter akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, serta Tingkat pelayanan jalan, yaitu LOS (*Level of Service*) yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan, di mana suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai mendekati 1. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas jalan (C) yang dapat dihitung dengan mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota. Kapasitas jalan (C) sendiri sebenarnya memiliki definisi sebagai jumlah kendaraan maksimal yang dapat ditampung di ruas jalan selama kondisi tertentu (MKJI, 1997).

Volume adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada suatu jalur gerak per satuan waktu yang biasanya digunakan satuan kendaran per waktu (Morlok, 1978). Satuan yang digunakan dalam menghitung volume lalu lintas (V) adalah satuan mobil penumpang (SMP). Untuk menunjukkan volume lalu lintas pada suatu ruas jalan maka dilakukan dengan pengalian jumlah kendaraan yang menggunakan ruas jalan tersebut dengan faktor ekivalensi mobil penumpang (EMP).

Level of Service (LOS) dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar jalan (V/C). Dengan melakukan perhitungan terhadap nilai LOS, maka dapat diketahui klasifikasi jalan atau tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan tertentu.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah disusun Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024, beserta Target Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.		Indeks Konektivitas	0,699	0,704	0,723	0,730	0,735
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	86,28	87,18	88,10	89,00	90,00
		Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanan/ Level of Service (LoS) minimal B	25,28	26,52	27,83	29,2	30,64

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah yang berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Perangkat daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dijabarkan dan disajikan pada Tabel 5.1. Selain itu untuk mendukung Nawa Bhakti Satya, program kegiatan Perangkat Daerah dijabarkan dan disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

MISI 4 : Mewujudkan Kemudahan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan dan Keterhubungan Wilayah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.	1.	Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	1.	Penanganan dengan cepat terhadap jalan yang rusak.	1.	Tim UPR selalu siaga di masing-masing UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan untuk perbaikan jalan setiap saat.
			2.	Mempertahankan kondisi jalan yang baik dan sedang.	2.	Penanganan kerusakan jalan dengan pemeliharaan rutin secara cepat, akurat dan tepat.
			3.	Meningkatkan kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi baik dan sedang.	3.	Penanganan dengan pemeliharaan berkala jalan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai umur rencana.
			4.	Pengembangan dan pemanfataan Teknologi untuk penanganan jalan menjadi lebih cepat dan lebih baik.	4.	Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan respon lebih cepat terhadap kerusakan jalan.
			5.	Peningkatan kapasitas jalan secara bertahap sampai dengan tuntas.	5.	Penggunaan alat pemeliharaan jalan berteknologi baru.
			6.	Peningkatan struktur terhadap jalan yang sudah habis umur rencananya.	6.	Peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan dengan dengan volume lalu lintas tinggi (VCR>1).
			7.	Pengembangan jaringan jalan provinsi	7.	Peningkatan struktur jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan yang rusak berat dan umur rencana sudah habis.
			8.	Pengembangan kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi.	8.	Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur (Pansela)
					9.	Pembangunan jalan menuju kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi

Tabel 5.2
Program Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendukung Nawa Bhakti

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
Bhakti-4 : JATIM AKSES	Penanganan Jalan dan Jembatan	Program Penanganan Jalan dan Jembatan (11 Program untuk 11 UPT)	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (11 Kegiatan untuk 11 UPT)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
			2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (11 Kegiatan untuk 11 UPT)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
			3. Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan (11 Kegiatan untuk 11 UPT)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah sebagai pendukung program merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai suatu hasil (*outcome*) suatu program. Rumusan Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur beserta pendanaannya secara rinci telah dijabarkan pada Tabel 6.1

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.				**Indeks Konektivitas**	**0,686**	**0,699**	**768.589.122.300**	**0,704**	**780.067.821.900**	**0,723**	**792.183.382.400**	**0,730**	**813.762.554.400**	**0,735**	**843.594.734.100**	**0,735**	**3.998.197.615.100**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur**	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			**Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah**	**84,48**	**86,28**	**-**	**87,18**	**-**	**88,10**	**-**	**89,00**	**-**	**90,00**	**-**	**90,00**	**-**		
			PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	**Persentase indikator program yang tercapai**	**93**	**95**	**31.970.000.000**	**96**	**33.568.500.000**	**97**	**33.568.500.000**	**98**	**34.575.548.000**	**99**	**34.921.303.000**	**99,00**	**168.603.851.000**	**SEKRETARIAT**	
				Persentase realisasi anggaran	**87,56**	**89,5**		**90**		**90,5**		**91**		**91,5**		**91,50**	**-**		
				Indeks Profesional ASN	**86,59**	**91**		**92**		**93**		**94**		**95**		**95,00**	**-**		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran	Jumlah Dokumen	**6,00**	6,00	6.095.000.000	6,00	6.399.750.000	6,00	6.399.750.000	6,00	6.591.743.000	6,00	6.657.660.000	**30,00**	**32.143.903.000**		Kota Surabaya
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	**12,00**	12,00	2.875.000.000	12,00	3.018.750.000	12,00	3.018.750.000	12,00	3.109.305.000	12,00	3.140.398.000	**60,00**	**15.162.203.000**		Kota Surabaya
			Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen	**12,00**	12,00	23.000.000.000	12,00	24.150.000.000	12,00	24.150.000.000	12,00	24.874.500.000	12,00	25.123.245.000	**60,00**	**121.297.745.000**		Kota Surabaya
	Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial			**Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanan/ Level of Service (LoS) minimal B.**	**23,49**	**25,28**		**26,52**		**27,83**		**29,20**		**30,64**		**30,64**			
		1.03.15	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA**	**Prosentase Gedung / Kantor yang layak dan memadai**	**73,24**	**74,18**	**43.449.953.000**	**74,92**	**44.387.951.000**	**75,66**	**44.387.951.000**	**76,4**	**45.719.590.000**	**77,14**	**46.176.777.400**	**77,14**	**224.122.222.400**	**SEKRETARIAT**	
		1.03.15.001	Pembangunan Gedung / Kantor	Jumlah luasan gedung / kantor yang baru	**6153,85**	3.608	23.449.953.000	3.752	24.387.951.000	3.752	24.387.951.000	3.865	25.119.590.000	3.903	25.370.777.400	**#######**	**122.716.222.400**		Tersebar di Jawa Timur
		1.03.15.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung / Kantor	Jumlah Luasan gedung / Kantor yang direhabilitasi	**25714,29**	11.429	20.000.000.000	11.429	20.000.000.000	11.429	20.000.000.000	11.771	20.600.000.000	11.889	20.806.000.000	**#######**	**101.406.000.000**		Tersebar di Jawa Timur
		1.03.16	**PROGRAM PENGELOLAAN PERALATAN BERAT DAN JEMBATAN BAILEY**	**Prosentase ketersediaan sarana peralatan berat dan jembatan bailey yang layak operasi**	**72,57**	**75**	**6.850.000.000**	**76,17**	**7.075.995.000**	**77,31**	**7.075.995.000**	**78,42**	**7.228.275.000**	**79,51**	**7.280.558.000**	**79,51**	**35.510.823.000**	**SEKRETARIAT**	
		1.03.16.001	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset Peralatan/Kendaraan	Jumlah dokumen laporan kondisi peralatan dan kendaraan	4	4	690.000.000	4	749.595.000	4	749.595.000	4	772.083.000	4	779.804.000	**20,00**	**3.741.077.000**		Tersebar di Jawa Timur
		1.03.16.002	Pengadaan alat berat dan Jembatan Bailey	Jumlah Pengadaan alat berat		1,00	2.000.000.000	1,00	2.000.000.000	1,00	2.000.000.000	1,00	2.000.000.000	1,00	2.000.000.000	**5,00**	**10.000.000.000**		
				Jumlah Pengadaan Peralatan		-		-		-		-		-		**-**	**-**		Tersebar di Jawa Timur
				Jumlah Pengadaan Jembatan Bailey		-		-		-		-		-		**-**	**-**		
		1.03.16.003	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat, peralatan dan kendaraan yang dipelihara		42,00	4.160.000.000	43,00	4.326.400.000	43,00	4.326.400.000	45,00	4.456.192.000	45,00	4.500.754.000	**45,00**	**21.769.746.000**		Tersebar di Jawa Timur
		1.03.17	**PROGRAM PENGATURAN DAN PENGENDALIAN JALAN DAN JEMBATAN**	**Jumlah dokumen kajian pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan dan dokumen lingkungan**	**2**	**2**	**11.275.000.000**	**2**	**11.726.000.000**	**2**	**11.726.000.000**	**2**	**12.077.780.000**	**2**	**12.198.558.000**	**10,00**	**59.003.338.000**	**BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN**	
				Jumlah dokumen laporan penanganan jalan dan jembatan	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**15,00**	**-**		
		1.03.17.001	Pengaturan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen kajian pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan, dan Dokumen Lingkungan	2	2	7.600.000.000	2	6.864.000.000	2	6.864.000.000	2	7.069.920.000	2	7.140.619.000	**10,00**	**35.538.539.000**		Tersebar di Jawa Timur
				Jumlah dokumen hasil survei perhitungan lalu lintas	2	2		2		2		2		2		**10,00**	**-**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah dokumen hasil survei kondisi jalan dan jembatan	2	2		2	0	2	0	2	0	2	0	**10,00**	-		
		1.03.17.002	Provincial Road Management System (PRMS) dan Peningkatan Tata Kelola/Institusi Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Jumlah Kegiatan Rapat Peningkatan Tata Kelola/Institusi	4	4		4		4						**12,00**	-		Tersebar di Jawa Timur
				Jumlah Dokumen Hasil Survey Jalan dan Jembatan	4	4		4		4						**12,00**	-		
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek PRMS	2	2		2		2						**6,00**	-		
				Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan PHJD	4	4		4		4						**12,00**	-		
		1.03.17.003	Penyiapan dan Pengolahan Data	Jumlah dokumen rancangan fungsi, status dan kelas jalan	2	2	0	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	**10,00**	**8.000.000.000**		
				Jumlah dokumen perencanaan umum jalan dan jembatan	2	2		2		2		2		2		**10,00**			
				Jumlah updating peremajaan dan pemeliharaan sistem manajemen jalan	2	1		1		1		1		1		**5,00**			
		1.03.17.004	Pengendalian Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan	2	2	3.675.000.000	2	2.862.000.000	2	2.862.000.000	2	3.007.860.000	2	3.057.939.000	**10,00**	**15.464.799.000**		Tersebar di Jawa Timur
				Jumlah Dokumen Leger Jalan	2	2		2		2		2		2		**10,00**	-		
				Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1	1		1		1		1		1		**5,00**	-		
				Jumlah dokumen laporan kinerja program, kegiatan dan anggaran	3	3		3		3		3		3		**15,00**	-		
		1.03.18	**PROGRAM PEMENUHAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN**	**Jumlah Dokumen Perencanaan yang Direalisasikan**	6	**6**	**25.196.976.950**	**6**	**22.887.173.857**	**6**	**21.740.500.000**	**6**	**22.960.020.553**	**6**	**23.658.482.000**	**30,00**	**116.443.153.360**	**BIDANG BINA TEKNIK**	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	26	26		26		26		26		26		**130,00**	-		
		1.03.18.001	Perencanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan	20,00	30,00	12.500.000.000	30,00	13.000.000.000	30,00	13.000.000.000	30,00	13.390.000.000	30,00	13.523.900.000	**150,00**	65.413.900.000		Tersebar di Jawa Timur
		1.03.18.002	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Perencanaan Jalan dan Jembatan Beserta Pendukungnya	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah dilakukan evaluasi	11,00	30,00	1.925.000.000	30,00	2.002.000.000	30,00	2.002.000.000	30,00	2.062.060.000	30,00	2.082.681.000	**150,00**	10.073.741.000		Kota Surabaya
				Jumlah Dokumen Kebijakan perencanaan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah Dokumen harga satuan dasar dan harga satuan pekerjaan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.18.003	Pembinaan Perencanaan Pengawasan dan Pengembangan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Teknologi Jalan dan Jembatan	6,00	6,00	2.300.000.000	6,00	2.392.000.000	6,00	2.392.000.000	6,00	2.463.760.000	6,00	2.488.398.000	**30,00**	12.036.158.000		Tersebar di Jawa Timur
				Jumlah Sosialisasi / Pelaksanaan Pembinaan Teknik	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah Kajian Teknik Jalan dan Jembatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan jembatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.18.004	Supervisi Penanganan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Penanganan Jalan dan Jembatan	50,00	15,00	7.371.976.950	9,00	4.349.173.857	6,00	3.202.500.000	8,00	3.865.880.553	9,00	4.373.400.000	**47,00**	23.162.931.360		Tersebar di Jawa Timur
		1.03.18.005	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Beserta Pendukungnya	Jumlah dokumen spesifikasi teknis yang dilaksanakan	12,00	12,00	1.100.000.000	12,00	1.144.000.000	12,00	1.144.000.000	12,00	1.178.320.000	12,00	1.190.103.000	**60,00**	5.756.423.000		Kota Surabaya
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.19	**PROGRAM PEMBINAAN, EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN SERTA FASILITASI PENGADAAN LAHAN**	**Persentase hasil pelaksanaan pembangunan / rekonstruksi jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya**	**100**	**100**	**12.643.700.000**	**100**	**17.752.574.500**	**100**	**21.779.725.500**	**100**	**14.206.708.810**	**100**	**23.861.995.400**	**100,00**	**90.244.704.210**	**BIDANG PEMBANGUNAN & PENINGKATAN**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.03.19.001	Pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan	Jumlah luasan pengadaan lahan	717,005	177,27	8.863.700.000	276,43	13.821.374.500	356,97	17.848.525.500	203,15	10.157.572.810	395,45	19.772.368.400	**1.409,27**	70.463.541.210		Tersebar di Jawa Timur
				Jumlah dokumen laporan hasil pengadaan lahan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.19.002	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan	Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan Rekonstruksi dan Pelebaran jalan	**1,00**	1,00	1.260.000.000	1,00	1.310.400.000	1,00	1.310.400.000	1,00	1.349.712.000	1,00	1.363.209.000	**5,00**	6.593.721.000		Kota Surabaya
				Jumlah dokumen laporan monitoring hasil pelaksanaan Rekonstruksi dan Pelebaran jalan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah dokumen pendukung kebijakan Rekonstruksi dan Pelebaran jalan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.19.003	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Penggantian Jembatan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan Penggantian jembatan	1,00	1,00	1.260.000.000	1,00	1.310.400.000	1,00	1.310.400.000	1,00	1.349.712.000	1,00	1.363.209.000	**5,00**	6.593.721.000		Kota Surabaya
				Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan Penggantian jembatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah dokumen laporan monitoring hasil pelaksanaan Penggantian jembatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.19.004	Penyusunan dokumen pelaksanaan pembangunan/rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan	Jumlah dokumen standar pengadaan pembangunan / rekonstruksi jalan dan penggantian Jembatan	1,00	1,00	1.260.000.000	1,00	1.310.400.000	1,00	1.310.400.000	1,00	1.349.712.000	1,00	1.363.209.000	**5,00**	6.593.721.000		Kota Surabaya
				Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan / rekonstruksi jalan dan penggantian Jembatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah dokumen laporan monitoring hasil pelaksanaan Penggantian jembatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.19.005	Penanganan Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Panjang rekonstruksi / peningkatan kapasitas struktur jalan											0	-	-		Tersebar di Jawa Timur
		1.03.20	**PROGRAM PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN**	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya**	**100**	**100**	**7.255.000.000**	**100**	**7.545.200.000**	**100**	**7.545.200.000**	**100**	**7.771.556.000**	**100**	**7.849.271.000**	**500,00**	**37.966.227.000**	**BIDANG PEMELIHARAAN**	
		1.03.20.001	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan pemeliharaan jalan	1,00	1,00	2.750.000.000	1,00	2.860.000.000	1,00	2.860.000.000	1,00	2.945.800.000	1,00	2.975.258.000	**5,00**	14.391.058.000		Kota Surabaya
				Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana/kejadian alam	**1,00**	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
		1.03.20.002	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan pemeliharaan jembatan	2,00	2,00	1.260.000.000	2,00	1.310.400.000	2,00	1.310.400.000	2,00	1.349.712.000	2,00	1.363.209.000	**10,00**	6.593.721.000		Kota Surabaya
				Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan jembatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		
				Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana/kejadian alam	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		**5,00**	-		

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.03.20.003	Penyusunan dokumen pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen standar pengadaan pemeliharaan jalan dan Jembatan	2,00	2,00	3.245.000.000	2,00	3.374.800.000	2,00	3.374.800.000	2,00	3.476.044.000	2,00	3.510.804.000	**10,00**	16.981.448.000		Kota Surabaya
			Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		**10,00**	-		
			Jumlah dokumen kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam/kejadian alam	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		**10,00**	-		
			Jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		**20,00**	-		
	1.03.20.004	Penanganan Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan											0	-	-		Tersebar di Jawa Timur
	1.03.21	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ SURABAYA**	**Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Surabaya**	**96,45**	**96,55**	**46.210.970.500**	**96,88**	**37.178.487.500**	**97,13**	**45.740.487.500**	**97,80**	**48.594.410.500**	**98,35**	**50.064.527.500**	**98,35**	**227.788.883.500**	**UPT PJJ SURABAYA**	Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Surabaya	**75,5**	**77,15**		**77,97**		**78,79**		**79,2**		**79,62**		**79,62**	-		**Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo**
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Surabaya	100,00	**100,00**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100,00**	-		
	1.03.21.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT PJJ Surabaya	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	3.300.000.000	6	3.432.000.000	6	3.432.000.000	6	3.534.960.000	6	3.570.310.000	30,00	17.269.270.000		Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4		4		4		4		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12		12		12		12		60,00	-		
	1.03.21.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT PJJ Surabaya	Panjang pemeliharaan rutin jalan	118,82	118,82	18.703.233.000	118,82	23.215.000.000	118,82	31.777.000.000	118,82	31.950.000.000	118,82	30.858.000.000	118,82	136.503.233.000		Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo
			Panjang pemeliharaan berkala jalan	1,39	2,00		2		2		2		3,1		11,10	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500		500		500		500		2.500,00	-		
	1.03.21.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT PJJ Surabaya	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		761,75	5.407.737.500	761,75	5.531.487.500	761,75	5.531.487.500	761,75	5.609.450.500	761,75	5.636.217.500	761,75	27.716.380.500		Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		15,00		15		15		15		15		75,00	-		
	1.03.21.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Surabaya	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		2,50	18.800.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1,5	7.500.000.000	2	10.000.000.000	8,00	46.300.000.000		Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo
			Panjang Penggantian Jembatan		20,00		0	0	0	0		0		0	-	-		
	1.03.21.005	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan PHJD Wilayah UPT PJJ Surabaya	Panjang pemeliharaan rutin jalan		118,82		118,82		118,82		118,82		118,82		594,10	-		
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		6,40		5,3		6,22		6,8		6,2		30,92	-		
	1.03.22	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ MOJOKERTO**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Mojokerto**	**93,63**	**94,47**	**49.274.692.000**	**94,66**	**57.652.008.043**	**94,66**	**57.713.320.000**	**95,06**	**75.949.039.447**	**95,28**	**73.005.836.000**	**95,28**	**313.594.895.490**	**UPT PJJ MOJOKERTO**	Kab. Mojokerto, Kab. Jombang
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Mojokerto	**75,33**	**79,03**		**79,77**		**80,52**		**81,26**		**81,86**		**81,86**	-		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Mojokerto	**100**	**100,00**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100,00**	-		

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Mojokerto	**70,5**	**73,09**		**78,28**		**86,05**		**90,72**		**95,39**		**95,39**	**-**		
	1.03.22.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Mojokerto	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.200.000.000	6	2.288.000.000	6	2.288.000.000	6	2.356.640.000	6	2.380.206.000	30,00	11.512.846.000		Kab. Mojokerto, Kab. Jombang
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4		4		4		4		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12		12		12		12		60,00	-		
	1.03.22.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT PJJ Mojokerto	Panjang pemeliharaan rutin jalan		134,36	16.745.307.000	134,36	24.612.000.000	134,36	26.980.000.000	134,36	36.890.000.000	134,36	32.292.000.000	134,36	137.519.307.000		Kab. Mojokerto, Kab. Jombang
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		1,0		3,0		2		3,5		3		12,50	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500		500		250		250		2.000,00	-		
	1.03.22.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT PJJ Mojokerto	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		263,20	4.313.320.000	263,2	4.559.546.143	263,2	2.445.320.000	263,2	4.548.280.000	263,2	4.583.630.000	263,20	20.450.096.143		Kab. Mojokerto, Kab. Jombang
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		21,65		27,3		22,1		18,4		28,8		118,25	-		
	1.03.22.004	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan PHJD Wilayah UPT PJJ Mojokerto	Panjang pemeliharaan rutin jalan		118,82		118,82		118,82		118,82		118,82		594,10	-		
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		6,40		5,3		6,22		6,8		6,2		30,92	-		
	1.03.22.005	Pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran Jalan serta pembangunan jembatan pada Kawasan Strategis Potensial Wilayah UPT PJJ Mojokerto	Panjang jalan yang terbangun		0,00	5.000.000.000	1	12.500.000.000	2	5.000.000.000	0,8	19.654.119.447	0,7	13.750.000.000	4,50	55.904.119.447		Kab. Mojokerto, Kab. Jombang
			Panjang rekonstruksi dan pelebaran jalan		1,00		1		1		1		1,1		5,10	-		
			Panjang jembatan yang terbangun					0	10		5		10		25,00	-		
	1.03.22.006	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Mojokerto	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		4,20	21.016.065.000	3,5	13.692.461.900	4,2	21.000.000.000	2,5	12.500.000.000	4	20.000.000.000	18,40	88.208.526.900		Kab. Mojokerto, Kab. Jombang
			Panjang Penggantian Jembatan		51,00		0	0	0	0	300		0	0	351,00	-		
	1.03.23	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ BOJONEGORO**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Bojonegoro**	**92,29**	**92,44**	**72.410.101.000**	**92,72**	**67.065.373.000**	**92,72**	**43.955.373.000**	**92,98**	**65.111.534.000**	**93,37**	**65.481.880.000**	**93,37**	**314.024.261.000**	**UPT PJJ BOJONEGORO**	**Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Bojonegoro	**63,42**	**70,04**		**70,8**		**71,56**		**72,48**		**73,16**		**73,16**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Bojonegoro	100	**100,00**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100,00**	**-**		
	1.03.23.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.200.000.000	6	2.310.000.000	6	2.310.000.000	6	2.379.300.000	6	2.403.093.000	30,00	11.602.393.000		Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4		4		4		4		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12		12		12		12		60,00	-		
	1.03.23.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT PJJ Bojonegoro	Panjang pemeliharaan rutin jalan		130,49	17.589.637.000	130,49	28.050.000.000	130,49	23.885.000.000	130,49	32.377.000.000	130,49	26.600.000.000	130,49	128.501.637.000		Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		1,00		2		2		2,5		2		9,50	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500		500		250		250		2.000,00	-		
	1.03.23.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT PJJ Bojonegoro	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		2180,64	11.695.464.000	2180,64	11.995.373.000	2180,64	11.995.373.000	2180,64	12.355.234.000	2180,64	12.478.787.000	2.180,64	60.520.231.000		Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		9,70		6,8		8		8,4		4		36,90	-		
	1.03.23.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Bojonegoro	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		3,50	40.925.000.000	4	24.710.000.000	4	5.765.000.000	3	18.000.000.000	4	24.000.000.000	18,50	113.400.000.000		Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Panjang Penggantian Jembatan		95,00		34		31		0	0	0	0	160,00	-		
	1.03.23.005	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan PHJD Wilayah UPT PJJ Bojonegoro	Panjang pemeliharaan rutin jalan		118,82		118,82		118,82		118,82		118,82		594,10	-		
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		6,40		5,3		6,22		6,8		6,2		30,92	-		
	1.03.24	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ MADIUN**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Madiun**	**91,52**	**91,72**	**49.048.188.000**	**92,03**	**38.438.651.000**	**92,03**	**38.608.651.000**	**93,66**	**37.847.971.000**	**93,96**	**38.925.571.000**	**93,96**	**202.869.032.000**	**UPT PJJ MADIUN**	**Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Madiun	**90,47**	**93,52**		**94,65**		**95,22**		**95,78**		**96,58**		**96,58**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Madiun	**100**	**100,00**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100,00**	**-**		
	1.03.24.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Madiun	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.200.000.000	6	2.310.000.000	6	2.310.000.000	6	2.379.300.000	6	2.403.093.000	30,00	11.602.393.000		Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4		4		4		4		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12		12		12		12		60,00	-		
	1.03.24.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Madiun	Panjang pemeliharaan rutin jalan		81,41	18.229.903.000	81,41	22.128.000.000	81,41	18.298.000.000	81,41	22.088.000.000	81,41	24.280.000.000	81,41	105.023.903.000		Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		1,00		1,5		1		1,5		1,5		6,50	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500		500		250		250		2.000,00	-		
	1.03.24.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Madiun	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		654,10	5.818.285.000	654,1	6.000.651.000	654,1	6.000.651.000	654,1	6.180.671.000	654,1	6.242.478.000	654,10	30.242.736.000		Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		20,00		20		20		20		20		100,00	-		
	1.03.24.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Madiun	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		3,80	22.800.000.000	3	8.000.000.000	2	12.000.000.000	1,2	7.200.000.000	1	6.000.000.000	11,00	56.000.000.000		Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo
			Panjang Penggantian Jembatan		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	1.03.25	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ PACITAN**	**Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Pacitan**	**90,52**	**90,60**	**50.703.931.000**	**91,22**	**39.593.920.000**	**91,22**	**51.577.920.000**	**91,71**	**49.500.278.000**	**92,16**	**54.846.371.000**	**92,16**	**246.222.420.000**	**UPT PJJ PACITAN**	**Kab. Pacitan**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Pacitan	**66,82**	**70,87**		**71,33**		**72,27**		**73,2**		**74,13**		**74,13**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Pacitan	**100**	**100,00**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100,00**	**-**		
			Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Pacitan	**13,96**	**18,93**		**25,56**		**32,18**		**35,5**		**42,12**		**42,12**	**-**		
	1.03.25.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Pacitan	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.750.000.000	6	2.887.500.000	6	2.887.500.000	6	2.974.125.000	6	3.003.866.000	30,00	14.502.991.000		Kab. Pacitan
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4		4		4		4		4		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00	-		
	1.03.25.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pacitan	Panjang pemeliharaan rutin jalan		102,29	16.667.431.000	102,29	19.682.000.000	102,29	24.666.000.000	102,29	19.291.000.000	102,29	25.785.000.000	102,29	106.091.431.000		Kab. Pacitan
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		1,00		1		1,5		1		1,5		6,00	-		

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500		500		250		250		2.000,00	-		
	1.03.25.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pacitan	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		914,80	6.821.980.000	914,8	7.024.420.000	914,8	7.024.420.000	914,8	7.235.153.000	914,8	7.307.505.000	914,80	35.413.478.000		Kab. Pacitan
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		16,50		25,4		14,5		7,6		27,2		91,20	-		
	1.03.25.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Pacitan	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		3,20	19.150.000.000	2	5.000.000.000	2,2	11.000.000.000	2	10.000.000.000	3	5.000.000.000	12,40	50.150.000.000		Kab. Pacitan
			Panjang Penggantian Jembatan		10,00		0	0	0	0	0		0		10,00	-		
	1.03.25.005	Pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran Jalan serta pembangunan jembatan pada Kawasan Strategis Potensial Wilayah UPT PJJ Pacitan	Panjang jalan yang terbangun			5.314.520.000	2	5.000.000.000	2	6.000.000.000	1	10.000.000.000	0,5	13.750.000.000	5,50	40.064.520.000		Kab. Pacitan
			Panjang rekonstruksi dan pelebaran jalan		1,00		2		2		0,5		2		7,50	-		
			Panjang jembatan yang terbangun				0	0	0	0	4		30		34,00	-		
	1.03.26	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ KEDIRI**	**Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Kediri**	**90,21**	**92,40**	**63.431.475.000**	**92,94**	**63.871.165.000**	**92,44**	**79.066.165.000**	**93,10**	**77.943.070.000**	**93,61**	**65.239.431.000**	**93,61**	**349.551.306.000**	**UPT PJJ KEDIRI**	**Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Kediri	**52,92**	**53,29**		**54,11**		**54,42**		**54,73**		**55,05**		**55,05**	**-**		
			Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Kediri	**31,51**	**37,94**		**45,14**		**51,38**		**58,58**		**68,18**		**68,18**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Kediri		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	**-**		
	1.03.26.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Kediri	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	4.400.000.000	6,00	4.620.000.000	6,00	4.620.000.000	6,00	4.758.600.000	6,00	4.806.186.000	30,00	23.204.786.000		
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00	-		
	1.03.26.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Kediri	Panjang pemeliharaan rutin jalan		167,77	25.360.725.000	167,77	37.841.000.000	167,77	41.536.000.000	167,77	40.507.000.000	167,77	36.264.000.000	**167,77**	181.508.725.000		Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		2,00		2,50		3,00		3,00		2,50		13,00	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500,00		500,00		250,00		250,00		2.000,00	-		
	1.03.26.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Kediri	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		1.395,00	8.670.750.000	1.395,00	8.910.165.000	1.395,00	8.910.165.000	1.395,00	9.177.470.000	1.395,00	9.269.245.000	**1.395,00**	44.937.795.000		Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		46,00		54,00		56,00		70,00		77,00		303,00	-		
	1.03.26.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Kediri	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		4,00	20.000.000.000	4,00	5.000.000.000	6,00	6.000.000.000	4,00	10.000.000.000	5,00	5.000.000.000	23,00	46.000.000.000		Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar
			Panjang Penggantian Jembatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	1.03.26.005	Pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran Jalan serta pembangunan jembatan pada Kawasan Strategis Potensial Wilayah UPT PJJ Kediri	Panjang jalan yang terbangun			5.000.000.000	1,00	7.500.000.000	0,80	18.000.000.000	1,00	13.500.000.000	1,00	9.900.000.000	3,80	53.900.000.000		Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Panjang rekonstruksi dan pelebaran jalan		1,00		2,00		1,80		1,20		3,00		9,00	-		
			Panjang jembatan yang terbangun					-	-	-		-	4,00		4,00	-		
	1.03.26.006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan PHJD Wilayah UPT PJJ Kediri	Panjang pemeliharaan rutin jalan		118,82		118,82		118,82		118,82		118,82		118,82	-		
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		6,40		5,3		6,22		6,8		6,2		30,92	-		
	1.03.27	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ MALANG**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Malang**	**90,18**	**91,78**	**55.563.897.500**	**92,17**	**48.495.795.000**	**92,17**	**42.270.995.000**	**92,62**	**51.902.075.000**	**92,78**	**54.833.216.000**	**92,78**	**253.065.978.500**	**UPT PJJ MALANG**	**Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Malang	**61,6**	**64,65**		**65,48**		**66,32**		**67,16**		**68,00**		**68,00**	**-**		
			Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Malang	**51,76**	**87,70**		**89,90**		**92,09**		**95,61**		**100,00**		**100,00**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Malang		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	**-**		
	1.03.27.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Malang	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.200.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.379.300.000	6,00	2.403.093.000	30,00	11.602.393.000		Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00	-		
	1.03.27.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Malang	Panjang pemeliharaan rutin jalan		116,41	20.419.000.000	116,41	19.227.800.000	116,41	19.585.000.000	116,41	26.788.000.000	116,41	25.558.000.000	**116,41**	111.577.800.000		Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		1,20		1,00		1,00		2,00		2,00		7,20	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500,00		500,00		250,00		250,00		2.000,00	-		
	1.03.27.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Malang	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		923,35	6.854.897.500	923,35	7.057.995.000	923,35	3.625.995.000	923,35	3.734.775.000	923,35	3.772.123.000	**923,35**	25.045.785.500		Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		21,00		40,00		-		-	-	-	-	61,00	-		
	1.03.27.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Malang	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		3,20	26.090.000.000	2,50	16.150.000.000	2,50	13.000.000.000	2,50	13.000.000.000	3,00	15.600.000.000	13,70	83.840.000.000		Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu
			Panjang Penggantian Jembatan		30,00		10,00		-	-	-	-	-	-	40,00	-		
	1.03.27.005	Pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran Jalan serta pembangunan jembatan pada Kawasan Strategis Potensial Wilayah UPT PJJ Malang	Panjang jalan yang terbangun		-		0,50	3.750.000.000	0,50	3.750.000.000	0,80	6.000.000.000	1,00	7.500.000.000	2,80	21.000.000.000		Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu
			Panjang rekonstruksi dan pelebaran jalan			-		-		-		-		-	-	-		
			Panjang jembatan yang terbangun					-	-	-		-	4,00		4,00	-		
	1.03.27.006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan PHJD Wilayah UPT Malang	Panjang pemeliharaan rutin jalan												-	-		
			Panjang pemeliharaan berkala jalan												-	-		
	1.03.28	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ PROBOLINGGO**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Probolinggo**	**87,94**	**89,44**	**31.144.458.500**	**89,61**	**61.104.974.000**	**89,61**	**81.937.520.000**	**90,14**	**71.019.672.000**	**90,71**	**58.708.619.000**	**90,71**	**303.915.243.500**	**UPT. PJJ PROBOLINGGO**	**Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab.Lumajang**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Probolinggo	**56,04**	**57,30**		**57,30**		**58,09**		**58,48**		**58,87**		**58,87**	**-**		

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Probolinggo	**36,62**	**37,87**		**40,67**		**43,42**		**45,64**		**50,38**		**50,38**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Probolinggo	**100**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	**-**		
	1.03.28.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Probolinggo	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.200.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.379.300.000	6,00	2.403.093.000	30,00	11.602.393.000		Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab.Lumajang
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00	-		
	1.03.28.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Probolinggo	Panjang pemeliharaan rutin jalan		125,93	22.760.000.000	125,93	34.647.000.000	125,93	36.141.000.000	125,93	37.250.000.000	125,93	35.267.000.000	**125,93**	166.065.000.000		Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab.Lumajang
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		14,00	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500,00		500,00		250,00		250,00		2.000,00	-		
	1.03.28.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Probolinggo	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		749,21	6.184.458.500	749,21	6.374.148.000	749,21	6.541.520.000	749,21	6.565.372.000	749,21	6.631.026.000	**749,21**	32.296.524.500		Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab.Lumajang
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00	-		Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab.Lumajang
	1.03.28.004	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan PHJD Wilayah UPT Probolinggo	Panjang pemeliharaan rutin jalan		125,93		125,93	-	125,93	-	125,93	-	125,93	-	**125,93**	-		
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		25,00	-		
	1.03.28.005	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Probolinggo	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		-	-	-	-	4,40	27.195.000.000	3,00	17.325.000.000	4,50	9.000.000.000	11,90	53.520.000.000		
			Panjang Penggantian Jembatan		-	-	-		13,00		5,00		61,30		79,30	-		
	1.03.28.006	Pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran Jalan serta pembangunan jembatan pada Kawasan Strategis Potensial Wilayah UPT PJJ Probolinggo	Panjang jalan yang terbangun			-	1,00	17.773.826.000	0,90	9.750.000.000	1,00	7.500.000.000	1,00	5.407.500.000	3,90	40.431.326.000		Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab.Lumajang
			Panjang rekonstruksi dan pelebaran jalan		1,00		1,25		1,30		1,00		3,60		8,15	-		
			Panjang jembatan yang terbangun				-	-	10,00		-	-	10,00		20,00	-		
	1.03.29	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ JEMBER**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Jember**	**90,12**	**90,37**	**76.378.210.350**	**90,81**	**80.794.813.000**	**90,81**	**68.104.313.000**	**91,02**	**72.021.882.000**	**91,51**	**83.041.238.000**	**91,51**	**380.340.456.350**	**UPT PJJ JEMBER**	**Kab. Jember, Kab. Bondowoso**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Jember	**51,04**	**51,14**		**51,60**		**52,15**		**52,71**		**52,99**		**52,99**	**-**		
			Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Jember	**5,29**	**11,90**		**18,52**		**23,89**		**29,93**		**39,76**		**39,76**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Jember	**100**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	**-**		
	1.03.29.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Jember	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.200.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.379.300.000	6,00	2.403.093.000	30,00	11.602.393.000		Kab. Jember, Kab. Bondowoso
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00	-		
	1.03.29.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT PJJ Jember	Panjang pemeliharaan rutin jalan		196,46	24.078.707.300	196,46	25.635.000.000	196,46	38.783.000.000	196,46	35.584.000.000	196,46	33.012.000.000	**196,46**	157.092.707.300		Kab. Jember, Kab. Bondowoso

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		1,50		1,50		2,50		2,00		2,00		9,50	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500,00		500,00		250,00		250,00		2.000,00	-		
	1.03.29.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT PJJ Jember	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		119,00	11.503.503.050	119,00	7.607.313.000	119,00	2.207.313.000	119,00	3.341.332.000	119,00	12.696.145.000	**119,00**	37.355.606.050		Kab. Jember, Kab. Bondowoso
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		24,68		23,80		5,80		16,20		40,70		111,18	-		
	1.03.29.004	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan PHJD Wilayah UPT Jember	Panjang pemeliharaan rutin jalan		125,93		125,93	-	125,93	-	125,93	-	125,93	-	**125,93**	-		
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		25,00	-		
	1.03.29.005	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Jember	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		4,60	29.841.000.000	4,20	28.955.000.000	4,20	6.985.000.000	3,00	19.800.000.000	5,00	24.180.000.000	21,00	109.761.000.000		Kab. Jember, Kab. Bondowoso
			Panjang Penggantian Jembatan		55,00		57,00		19,00		16,00		30,60		177,60	-		
	1.03.29.006	Pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran Jalan serta pembangunan jembatan pada Kawasan Strategis Potensial Wilayah UPT PJJ Jember	Panjang jalan yang terbangun			8.755.000.000	1,00	16.287.500.000	1,00	17.819.000.000	0,50	10.917.250.000	1,10	10.750.000.000	3,60	64.528.750.000		Kab. Jember, Kab. Bondowoso
			Panjang rekonstruksi dan pelebaran jalan		1,75		1,75		1,42		1,60		1,90		8,42	-		
			Panjang jembatan yang terbangun				-	-	10,00		-	-	10,00		20,00	-		
	1.03.30	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ BANYUWANGI**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Banyuwangi**	**90,09**	**92,48**	**57.714.633.500**	**93,13**	**61.247.976.000**	**93,13**	**46.967.976.000**	**93,92**	**55.521.915.000**	**94,20**	**73.399.719.800**	**94,20**	**294.852.220.300**	**UPT PJJ BANYUWANGI**	**Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Banyuwangi	**44,9**	**48,48**		**49,37**		**49,82**		**50,71**		**51,15**		**51,15**	**-**		
			Persentase penanganan akses jalan menuju kawasan potensial di Wilayah UPT PJJ Banyuwangi	**0**	**5,64**		**18,60**		**31,23**		**40,81**		**56,60**		**56,60**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Banyuwangi		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	**-**		
	1.03.30.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	2.200.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.310.000.000	6,00	2.379.300.000	6,00	2.403.093.000	30,00	11.602.393.000		Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00	-		
	1.03.30.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT PJJ Banyuwangi	Panjang pemeliharaan rutin jalan		108,16	21.242.500.000	108,16	23.935.000.000	108,16	19.800.000.000	108,16	23.508.000.000	108,16	30.661.665.800	**108,16**	119.147.165.800		Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		2,10		2,20		1,55		2,40		2,90		11,15	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		500,00		500,00		250,00		250,00		2.000,00	-		
	1.03.30.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT PJJ Banyuwangi	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		1.244,71	6.772.133.500	1.244,71	5.787.976.000	1.244,71	5.907.976.000	1.244,71	5.034.615.000	1.244,71	5.084.961.000	**1.244,71**	28.587.661.500		Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembalan		5,80		6,00		6,80		-	-	-	-	18,60	-		
	1.03.30.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Banyuwangi	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		4,50	22.500.000.000	4,50	15.965.000.000	4,00	6.000.000.000	3,00	15.000.000.000	4,00	20.000.000.000	20,00	79.465.000.000		Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo
			Panjang Penggantian Jembatan		-	-	11,00		7,00		-		-		18,00	-		
	1.03.30.005	Pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran Jalan serta pembangunan jembatan pada Kawasan Strategis Potensial Wilayah UPT PJJ Banyuwangi	Panjang jalan yang terbangun			5.000.000.000	0,50	13.250.000.000	0,50	12.950.000.000	0,50	9.600.000.000	0,80	15.250.000.000	2,30	56.050.000.000		Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo
			Panjang rekonstruksi dan pelebaran jalan		1,00		1,30		1,24		1,20		1,25		5,99	-		

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Panjang jembatan yang terbangun				10,00		10,00			-	10,00		30,00	-		
	1.03.31	**PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UPT PJJ PAMEKASAN**	**Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Pamekasan**	**84,92**	**86,29**	**53.372.715.000**	**86,51**	**53.309.579.000**	**86,74**	**54.103.804.400**	**87,36**	**47.917.691.090**	**87,87**	**53.771.507.000**	**87,87**	**262.475.296.490**	**UPT PJJ PAMEKASAN**	**Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep**
			Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Pamekasan	**40,35**	**43,26**		**43,98**		**44,71**		**45,43**		**46,16**		**46,16**	**-**		
			Persentase laporan yang tepat waktu di Wilayah UPT PJJ Pamekasan	**100**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**	**-**		
	1.03.31.001	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan	Jumlah laporan kondisi jalan dan jembatan yang tepat waktu		6,00	3.300.000.000	6,00	3.465.000.000	6,00	3.465.000.000	6,00	3.568.950.000	6,00	3.604.640.000	30,00	17.403.590.000		Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep
			Jumlah laporan ketatausahaan yang tepat waktu		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00	-		
			Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00	-		
	1.03.31.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT PJJ Pamekasan	Panjang pemeliharaan rutin jalan		138,90	19.934.000.000	138,90	20.987.000.000	138,90	22.857.000.000	138,90	22.000.000.000	138,90	26.882.000.000	**138,90**	112.660.000.000		Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep
			Panjang pemeliharaan berkala jalan		1,00		1,20		1,20		1,20		1,50		6,10	-		
			Panjang penanganan bangunan pelengkap jalan		500,00		250,00		500,00		250,00		250,00		1.750,00	-		
	1.03.31.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan	Panjang pemeliharaan rutin jembatan		835,90	5.528.215.000	835,90	6.357.579.000	835,90	7.781.804.400	835,90	6.486.056.000	835,90	7.284.867.000	**835,90**	33.438.521.400		Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep
			Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan		25,90		20,50		33,00		20,70		5,80		105,90	-		
	1.03.31.004	Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan serta Penggantian Jembatan Wilayah UPT PJJ Pamekasan	Panjang Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan		4,50	24.610.500.000	4,50	22.500.000.000	4,00	20.000.000.000	4,20	15.862.685.090	3,20	16.000.000.000	20,40	98.973.185.090		Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep
			Panjang penggantian jembatan		6,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.03.32	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM BAHAN JALAN DAN JEMBATAN**	**Persentase kepuasan pelayanan dan pengujian laboratorium**	**100**	**100**	**24.695.220.000**	**100**	**26.371.686.000**	**100**	**34.312.986.000**	**100**	**15.893.538.000**	**100**	**16.329.873.000**	**100,00**	**117.603.303.000**	**UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI**	**Kota Surabaya**
	1.03.32.001	Pengadaan alat - alat laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Pengadaan alat alat laboratorium kebinamargaan		5,00	13.670.220.000	4,00	14.795.436.000	4,00	22.736.736.000	4,00	3.970.000.000	4,00	4.287.100.000	21,00	59.459.492.000		
	1.03.32.002	Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat - alat laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat alat laboratorium kebinamargaan yang disertifikasi/ kalibrasi		10,00	3.150.000.000	10,00	3.307.500.000	10,00	3.307.500.000	10,00	3.406.725.000	10,00	3.440.792.000	50,00	16.612.517.000		
	1.03.32.003	Pelayanan dan Pengujian Laboratorium bahan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen rencana program pelayanan dan pengujian		2,00	4.725.000.000	2,00	4.961.250.000	2,00	4.961.250.000	2,00	5.110.088.000	2,00	5.161.189.000	10,00	24.918.777.000		
			Jumlah dokumen laporan pelayanan dan pengujian		12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00		60,00	-		
	1.03.32.004	Pengendalian Manajemen Mutu	Jumlah dokumen rencana program manajemen mutu		2,00	1.470.000.000	2,00	1.543.500.000	2,00	1.543.500.000	2,00	1.589.805.000	2,00	1.605.703.000	10,00	7.752.508.000		
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan manajemen mutu		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00	-		
			Jumlah dokumen evaluasi penerapan manajemen mutu		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00	-		
	1.03.32.005	Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu		12,00	1.680.000.000	12,00	1.764.000.000	12,00	1.764.000.000	12,00	1.816.920.000	12,00	1.835.089.000	60,00	8.860.009.000		
			Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00			
			Jumlah dokumen laporan aset		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		60,00			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain senantiasa dihubungkan oleh jalur - jalur transportasi, sehingga membentuk pola jaringan transportasi, pendukung kekuatan, dan intensitas interaksi antarwilayah adalah kondisi prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di sekitarnya. Jumlah dan kualitas prasarana jalan, baik jalan raya, jalur udara, maupun laut, tentunya sangat memperlancar laju dan pergerakan distribusi manusia, barang, dan jasa antarwilayah. Tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus interaksi.

Untuk mengukur kinerja jalan antar wilayah di Jawa Timur, maka disusun parameter sebagai berikut :

1. Indeks Konektivitas,
2. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah,
3. Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan,
4. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap,
5. Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan.

Indikator Tujuan, berupa **Indeks konektivitas**, yang merupakan rasio dari jumlah kota dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan. Parameter ini merupakan tolak ukur pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, serta mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan kondisi kemantapan jalan, dengan masing – masing variabel yang mempunyai tingkat dukungan berbeda, namun memberikan pengaruh yang kuat, sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai indeks konektivitas.

Selain itu juga ditetapkan **Indikator Sasaran** dalam Rencana Strategis. Pertama, Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

yang merupakan parameter akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Kedua, Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan jalan, yaitu LOS (*Level of Service*) yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan, di mana suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai mendekati 1.

Level of Service (LOS) dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar jalan (V/C). Dengan melakukan perhitungan terhadap nilai LOS, maka dapat diketahui klasifikasi jalan atau tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan tertentu. Adapun standar nilai LOS dalam menentukan klasifikasi jalan adalah sebagai berikut :

FAKTOR UKURAN KOTA	BATAS LINGKUP V/C	TINGKAT PELAYANAN
Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah	0,00 – 0,20	A
Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas	0,20 – 0,44	B
Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan	0,45 – 0,74	C
Arus mendekati stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan. V/C masih dapat ditolerir	0,75 – 0,84	D
Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0,85 – 1,00	E
Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, antrian panjang (macet)	≥ 1,00	F

Kinerja pelayanan jalan provinsi ditentukan dengan persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan minimal B, yang diperoleh dari ruas jalan yang memenuhi tingkat pelayanan A dan B dibagi dengan total panjang jalan provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Jawa Timur, antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, serta informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat - pusat pertumbuhan ekonomi.

Adapun indikator kinerja yang mengacu pada target tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.	Indeks Konektivitas	0,686	0,699	0,704	0,723	0,730	0,735	0,735
SASARAN 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84,48	86,28	87,18	88,10	89,00	90,00	90,00
SASARAN 2 Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi Tingkat Pelayanan/ Level of Service (LoS) minimal B.	23,49	25,28	26,52	27,83	29,2	30,64	30,64

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Program dan Anggaran Tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 disusun untuk menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan dalam Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan ketatalaksanaan, serta komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renstra. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target - target kinerja dalam Renstra 2019 - 2024.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diharapkan akan lebih terarah, terintegrasi, dan sinergis, serta berkelanjutan.

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

dbmjatim

dbmjatim

binamargajatim